

Rekaman Suara Beredar

Dari Halaman 1

lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang kini telah berubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Kom-digi).

"Itu fitnah. Framing. Tony ditekankan oleh PDIP," ujar suara pria dalam rekaman yang diduga kuat merupakan suara Budi Arie.

Ia menegaskan tak pernah meminta bagian dari praktik ilegal tersebut, dan menyebutkan PDIP sebagai dalang pembentukan opini publik terhadap dirinya.

"PDIP framing saya. Otaknya mereka." Unggahan video itu diambil dari akun @ Ary_PrasKe2 dan disertai komentar dari Guntur Romli yang mengingatkan Budi Arie agar

berhati-hati dalam melontarkan tuduhan. "Kalau ini benar suara Budi Arie, dia sedang menyebar fitnah. Tuduhan tanpa bukti bisa berbalik. Mulutmu harimaumu," tulis Guntur, Kamis, 22 Mei 2025.

Dalam rekaman itu, pria tersebut juga mengungkapkan kekecewaannya atas pemberitaan yang menyudutkan dirinya, dan menilai PDIP memiliki motif politik tertentu di balik serangan tersebut.

"Saya tahu ini ujung-ujungnya PDIP. Nanti saya jelaskan semua. Media jangan ikut-ikutan tabuh genderang mereka," katanya.

Lebih lanjut, Budi mengklaim tengah menyiapkan bukti untuk membuktikan keterlibatan PDIP dalam dugaan kampanye hitam terhadap dirinya. Ia juga menyatakan sedang

memetakan media-media yang dianggap berpihak atau berseberangan.

Tuduhan terhadap PDIP bukan kali ini saja muncul. Pada November 2024, Koordinator Paguyuban Masyarakat Anti Hoaks, Teuku Afriadi, sempat mengungkap bahwa Zulkarnaen alias Tony merupakan bagian dari Tim Pemenangan Pilkada 2024 PDIP. Hal ini merujuk pada SK DPP PDIP Nomor: 942/KPTS/DPP/V/2024 yang ditandatangani Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, di mana nama Tony tercantum sebagai anggota tim kampanye.

Tak hanya itu, terdakwa lain dalam kasus judi online, Alwin Jabarti Kiemas, juga dikaitkan dengan PDIP karena disebut sebagai keponakan almarhum Taufik Kiemas, suami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. (hs/js)

Ibadah yang Tak Pernah Netral

Dari Halaman 1

Muhibbullah Azfa Manik, Dosen Universitas Bung Hatta, Ahad (25/5/2025).

Lanjutnya, ekonomi politik haji menyoroti relasi kekuasaan yang melingkupi penyelenggaraan ibadah ini. Siapa yang memegang kendali atas kuota, visa, akomodasi, hingga pengelolaan dana jamaah? Jawabannya: negara, oligarki biro haji, dan Arab Saudi sebagai pengendali tunggal situs suci.

"Di Indonesia, urusan haji tak ubahnya satu ekosistem birokrasi yang begitu tertutup namun sangat menggiurkan. Dalam struktur ini, jamaah bukan lagi sekadar umat, melainkan komoditas politik dan ekonomi," sebutnya.

Bahkan, urai Muhibbullah Azfa Manik, sejak pendaftaran haji, jamaah sudah menjadi "investor" dalam sistem keuangan negara. Setoran awal mereka — yang harus menunggu antrean belasan hingga puluhan tahun — dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Nilainya sangat besar: lebih dari Rp160 triliun. Sebagian besar dana ini diinvestasikan ke Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), mendanai pembangunan infrastruktur pemerintah. Sebuah ironi yang jarang dibahas: jamaah membiayai negara lebih dulu sebelum mereka berangkat ke Tanah Suci.

Pada titik ini, politik ekonomi haji mengambal alih sorotan. Bagaimana negara menyusun

ongkos haji? Apakah wajar biaya disubsidi oleh nilai manfaat dana kelolaan? Siapa yang menentukan harga tiket, hotel, dan catering? Ini semua bukan keputusan spiritual, melainkan kebijakan ekonomi yang sangat politis. Ketika harga haji naik, protes muncul. Ketika harga ditekan, muncul defisit. Dalam tiap keputusan, negara harus menimbang antara menjaga daya beli jamaah dan menjaga keberlanjutan dana. Tapi sering kali, keputusan itu juga dipengaruhi oleh momen elektoral dan sensitivitas umat.

"Di sinilah populisme religius kerap bermain. Pemerintah ingin tampil sebagai pelindung umat, bahkan ketika subsidi itu ditarik dari dana umat sendiri. Ketika publik menolak kenaikan biaya haji, narasi keadilan sosial dilemparkan. Tapi pada saat yang sama, tidak ada transparansi memadai tentang bagaimana dana dikelola dan siapa yang diuntungkan. Ibadah menjadi panggung, dan umat jadi penonton yang terus membayar tiket," cecarnya.

Muhibbullah Azfa Manik menuturkan, hubungan dengan Arab Saudi pun sarat negosiasi diplomatik dan ekonomi. Kuota haji dibagikan oleh Saudi, sistem visa digital diatur oleh Saudi, bahkan perusahaan catering dan hotel pun banyak yang dikuasai oleh jaringan bisnis Saudi. Indonesia, sebagai negara dengan jamaah haji terbanyak di dunia, tidak memiliki posisi tawar yang sekuat jumlahnya. Diplomasi haji sering berjalan seiring dengan hubungan politik dan ekonomi dua negara, bukan semata urusan

keagamaan.

"Dan dalam praktiknya, jasa haji juga telah menjadi sektor industri. Travel umrah dan haji khusus tumbuh bak jamur di musim hujan. Namun ini melahirkan ketimpangan baru: yang kaya bisa berangkat berkali-kali melalui jalur khusus, sementara yang miskin menunggu antrean 20 tahun. Privatisasi sebagian layanan haji tidak serta-merta menghadirkan keadilan. Justru makin memperlebar jurang antara "jamaah VIP" dan "jamaah reguler".

"Sayangnya, diskursus publik soal haji nyaris selalu dikurung dalam pertanyaan fikh: sah atau tidak, halal atau haram, sesuai syariat atau bid'ah. Sangat jarang dibuka ruang kritis untuk membahas pertanyaan kebijakan: apakah pengelolaan haji adil, transparan, dan akuntabel? Apakah benar ibadah ini dikelola semata-mata untuk kemaslahatan umat?"

Dalam dunia yang semakin terdigitalisasi dan berdampak krisis ekonomi, ibadah haji semestinya dikembalikan ke prinsip dasarnya: bukan hanya ibadah spiritual, tapi juga amanah publik. Karena itu, kontrol publik, transparansi pengelolaan, dan audit yang terbuka terhadap BPKH dan Kementerian Agama mutlak diperlukan.

Haji adalah puncak ibadah, tapi juga puncak akumulasi kekuasaan simbolik dan material. Maka sudah waktunya umat Islam melihat ibadah ini dengan dua mata: satu untuk langit, satu untuk bumi. Di langit ada nilai keikhlasan, di bumi ada logika anggaran dan kekuasaan. (A-02)

Usulan Pangkas Masa Perjalanan Haji

Dari Halaman 1

DPR saja. "Karena sophisticated sekali, rumit sekali urusan haji itu. Bahkan istilahnya, tidak ada sistem penyelenggaraan ibadah yang penyelenggaraannya itu selalu berubah setiap tahun," ungkapnya.

Haedar mencontohkan soal syariaah haji, sistem baru layanan jamaah haji di Tanah Suci, Mekkah dan Madinah, Arab Saudi. Niat dari skema ini baik, meski persepsi masyarakat bisa saja berbeda.

"Kedua, masyarakat kita ini masih masyarakat paguyuban yang mungkin juga didukung oleh berbagai hal, maka perlu penyesuaian. Ketiga, kan ada juga yang bermazhab untuk Arabain segala macam kan, jadi (usul pangkas masa haji) dikaji lah untuk yang akan datang, yang akan datang, yang akan datang," ungkapnya.

"Kalau memang itu bagus, tapi nanti harus ditetapkan bersama," sambung Haedar.

Bagaimanapun, Haedar enggan untuk membahasnya dari sisi peluang anggaran yang bisa ditekan karena merasa bukan ranahnya.

Sedangkan mengenai esensi dari ibadah itu sendiri dengan adanya usulan pemangkasan durasi ini, bagi dia tetap harus melalui pengkajian untuk menilainya.

"Ya dikaji, kuncinya dikaji bersama," pungkash Haedar. Sebelumnya, Kepala Badan Penyelenggara Haji RI Muhammad Irfan Yusuf alias Gus Irfan telah mengungkapkan target pengurangan masa tinggal jamaah haji RI selama 5 hingga 10 hari pada musim ibadah haji 2026.

Ia menyampaikan itu dalam merespons usulan berbagai pihak untuk memangkas masa tinggal jamaah. Gus Irfan mengaku telah merencanakan pemangkasan masa tinggal jamaah haji asal RI tersebut. Dia berupaya mengurangi masa tinggal jamaah itu karena menelan cukup banyak biaya.

Gus Irfan menyebut telah memulai pembicaraan dengan pihak Arab Saudi perihal wacana itu. Namun, ia menjelaskan upaya memangkas masa tinggal jamaah itu bukanlah perkara yang sederhana. Upaya itu harus menyesuaikan dengan slot penerbangan yang cukup terbatas.

Belakangan wacana pemangkasan masa tinggal jamaah haji di Mekah dan Madinah, Arab Saudi demi memangkas ongkos atau biaya ibadah murah mencuat ke publik.

Ada yang mengusulkan masa tinggal dikurangi dari yang sudah ditetapkan 40 hari menjadi 30 atau 20 hari.

Sementara itu, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Cholil Nafis mengusulkan masa tinggal hanya selama 20 hari.

Cholil mengatakan dengan melaksanakan sunnah, mungkin dibutuhkan waktu 10 hari di Makkah. Oleh karenanya, ia berpendapat masa tinggal 17-20 hari sudah cukup. (cnni/js)

Diburu, 6 Kepala Desa Jadi

Dari Halaman 1

(PSU) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024.

"Kami memburu enam orang kades dalam kasus dugaan politik uang tersebut," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Gorontalo Utara AKP Muhammad Arianto di Gorontalo, Minggu.

Berikut enam nama tersangka dalam DPO, yaitu Rahman Desei Kepala Desa Pinontoyonga, Kusno V. Gobel Kepala Desa Sigaso, Isnain Talaban Kepala Desa Imana, Hartono Datou Kepala Desa Buata, Anton Puabengga Kepala Desa Bintana, Hamran Ahaya Kepala Desa Olohuta.

Keenamnya berasal dari wilayah timur kabupaten, di Kecamatan Atinggola.

Kepolisian mengimbau masyarakat yang mengetahui keberadaan para tersangka, agar segera melaporkan kepada kepolisian terdekat.

"Sebelumnya kami sudah berusaha mendapatkan Tahap II di hari tersebut, namun kami hanya bisa mendapatkan P21. Sehingga harus tertib administrasi. Jika tidak dikeluarkan dari tahanan sesuai tanggal penahanan maka kami melanggar HAM, karena menahan orang tanpa dasar," kata Kasat.

Ia menjelaskan prosedur penahanan para tersangka hanya sampai tanggal 22 Mei dan daluwarsa kasus pada 23 Mei 2025.

Pihaknya meluruskan bahwa terjadi kesalahan perhitungan hari pada penahanan para tersangka.

Pada awalnya hasil koordinasi untuk masa daluwarsa kasus mulai terbit dan dilakukan naik sidik pada tanggal 2 Mei 2025.

dalam konteks perang yang mencerminkan ajaran ekstremis ISIS. Nomor telepon yang digunakan oleh MAS teridentifikasi sebagai pengelola utama kanal tersebut," jelasnya.

Selain mengamankan terduga teroris, polisi juga menyita satu unit handphone yang diduga digunakan untuk aktivitas komunikasi dan penyebaran konten terorisme.

"Saat ini, MAS telah diamankan untuk proses interogasi lebih lanjut serta pengembangan penyidikan," katanya.

MTQ Jadi Simbol Kesuksesan

Dari Halaman 1

diri dengan masyarakat Kota Medan yang sangat plural," ujar Wara kepada media, Sabtu (24/5/2025).

Menurut Wara, keberhasilan Rico Waas dalam membangun hubungan dengan warga tak lepas dari kemampuannya beradaptasi secara kultural, meskipun ia bukan penduduk asli Medan. Ia menilai Waas cepat menyatu dengan berbagai komunitas dan etnis di ibukota Sumatera Utara ini.

"Kita bisa lihat, ketika dia berkunjung ke daerah Padang Bulan, dia cepat akrab dengan masyarakat Karo. Bergaul dengan etnis Tionghoa juga terlihat alami. Begitu pula dengan komunitas India. Ia betul-betul mampu mengayomi masyarakat plural di Medan ini," ujar Wara.

Adaptasi lintas budaya ini, kata Wara, menjadi modal penting dalam membangun harmoni sosial di kota besar seperti Medan, yang sejak lama dikenal sebagai rumah bagi berbagai suku, agama, dan budaya.

Tata Kelola yang Baik
Terpisah, aktivis sosial dan pemerhati pembangunan Kota Medan, Azhari AM Sinik, juga merespon positif kepemimpinan 100 hari Rico-Zaki. Menurutnya, keduanya telah membawa perubahan dengan membuat tata kelola yang baik bagi kota ini.

Slogan "Medan untuk Semua, Semua untuk Medan" yang diusung Rico Waas dinilainya bukan sekadar retorika. Azhari menyebutkan, janji tersebut dibuktikan lewat kerja nyata dalam tata kelola pemerintahan, pengelolaan anggaran, hingga pelayanan kepada masyarakat.

"Hal itu ia kerjakan dengan baik. Ia membuk-

tiken komitmennya lewat kinerja yang membawa kebaikan dalam berbagai aspek pemerintahan," ujar Azhari Sinik, Sabtu (24/5/2025).

Menurut Azhari, selama hampir 100 hari menjabat, Rico Waas mampu menjaga stabilitas tanpa memunculkan gejolak yang berarti. Kepemimpinannya juga mendapat respons positif, tak hanya dari masyarakat, tetapi juga dari kalangan aparat sipil negara (ASN).

"Bukan hanya masyarakat biasa saja yang memuji, tetapi juga dari kalangan ASN. Mereka (ASN) merasa nyaman selama dipimpin Rico Waas," kata Azhari.

Ia pun menilai, rasa aman dan nyaman itu penting untuk membangun birokrasi yang sehat dan pelayanan publik yang optimal.

"Semoga ini terus berjalan dengan baik dan seperti yang diharapkan masyarakat Kota Medan," tutup Azhari Sinik. (A-10)

Budi Arie Melawan

Dari Halaman 1

dengan menutup ribuan situs dalam waktu 15 bulan. Tak berhenti di situ, Budi juga mengatakan, ada salah satu partai politik (parpol) yang bekerja sama dengan para bandar judi.

Ketua umum Pro Jokowi ini menyebutkan bahwa partai politik itu masih bercokol di DPR RI. (kps/js)

Bengkulu Diguncang

Dari Halaman 1

resmi media sosial BNPB, Minggu (25/5).

Gempa yang terjadi pada Jumat (23/5), pukul 02.52 WIB itu dirasakan sejumlah daerah di Provinsi Bengkulu. Ratusan rumah yang rusak tersebar di Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah.

Rumah rusak di Kota Bengkulu berjumlah 206 unit, delapan di antaranya dengan kategori rusak berat. Sedangkan enam fasilitas umum juga mengalami kerusakan, yaitu masjid dua unit, kantor camat dua unit dan sekolah dua unit.

Sebaran kerusakan terdapat di lima kecamatan yaitu Kecamatan Selebar, Gading Cempaka, Singaran Pati, Sungai Serut dan Kampung Melayu.

Di wilayah Bengkulu Tengah, sebanyak 49 rumah dan empat unit sekolah rusak karena guncangan gempa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat masih terus melakukan verifikasi tingkat kerusakan dan pendataan di lapangan.

Sebaran dampak dari gempa bumi di Kabupaten Bengkulu Tengah berada di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Pondok Kelapa, Pondok Kubang dan Talang Empat.

BPBD Kota Bengkulu mencatat 206 KK 792 jiwa terdampak gempa tersebut, sedangkan di Kabupaten Bengkulu Tengah sebanyak 49 KK.

Laporan data terakhir menyebutkan tidak ada pengungsian warga. Warga memilih untuk berada di sekitar rumah dan enggan meninggalkan rumah karena faktor kenyamanan dan keamanan.

Sementara itu, penerangan yang sempat padam telah diperbaiki petugas. Fasilitas listrik sudah kembali pulih. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menyatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu telah menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi.

"Status tanggap darurat ditetapkan Wali Kota Bengkulu melalui Surat Keputusan Nomor 110/2025, berlaku selama tujuh hari sejak 23 Mei sampai 29 Mei 2025," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari. (cnni/js)



PT Dalam Krisis

Dari Halaman 1

bahwa angka pengangguran terdidik di Indonesia mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Bahkan, lulusan sarjana dan diploma menjadi salah satu kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi. Ini menunjukkan bahwa gelar akademis saja tidak cukup untuk menjamin akses ke lapangan kerja, terutama di era digital yang semakin menuntut keterampilan praktis dan adaptabilitas.

Salah satu penyebab utama kesenjangan keterampilan adalah kurangnya sinkronisasi antara kurikulum pendidikan tinggi dan kebutuhan industri. Banyak perguruan tinggi masih fokus pada teori dan pendekatan akademis yang kurang relevan dengan dunia kerja modern. Mahasiswa seringkali lulus dengan pengetahuan yang mendalam tentang teori, tetapi minim keterampilan teknis dan praktis yang dibutuhkan di lapangan.

Selain itu, perkembangan teknologi yang begitu cepat juga menciptakan jurang keterampilan yang sulit dijangkau. Industri 4.0, kecerdasan buatan, big data, dan teknologi finansial (fintech) menuntut pekerja yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi. Sayangnya, banyak lulusan tidak dibekali dengan keterampilan digital dan teknologi yang memadai, sehingga sulit bersaing dengan pekerja lain, termasuk dari negara-negara tetangga yang lebih siap secara digital.

Faktor lain adalah kurangnya soft skills atau keterampilan interpersonal, seperti komunikasi, kepemimpinan, pemecahan masalah, dan kerja tim. Dalam survei yang dilakukan World Economic Forum, keterampilan ini sering kali dianggap lebih penting daripada hard skills oleh banyak pemberi kerja. Namun, banyak perguruan tinggi masih menganggap soft skills sebagai pelengkap, bukan sebagai komponen utama dalam pembelajaran.

Kesenjangan keterampilan ini berdampak luas, baik bagi lulusan maupun dunia industri. Bagi lulusan, kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka sering kali menimbulkan frustrasi dan rasa putus asa. Banyak yang akhirnya bekerja di sektor informal atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualifikasi mereka, hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Bagi industri, kesenjangan ini berarti waktu dan biaya tambahan untuk melatih karyawan baru agar siap kerja. Ini juga dapat menghambat produktivitas dan inovasi, karena perusahaan harus terus mencari talenta yang sesuai, sering kali dari luar negeri, yang pada akhirnya mengurangi kesempatan kerja bagi lulusan lokal.

Untuk mengatasi masalah ini, perubahan mendasar diperlukan dalam sistem pendidikan tinggi. Pertama, perlu ada upaya untuk memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri, sehingga kurikulum dapat lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Program magang, proyek nyata, dan pembelajaran berbasis masalah harus menjadi bagian integral dari pendidikan tinggi.

Kedua, pengembangan soft skills perlu lebih diperhatikan. Perguruan tinggi harus mulai melihat keterampilan ini sebagai bagian penting dari kompetensi lulusan, bukan sekadar tambahan. Ini dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler, pelatihan kepemimpinan, dan simulasi dunia kerja.

Ketiga, literasi digital harus menjadi prioritas. Kampus perlu membekali mahasiswa dengan keterampilan teknologi yang relevan, termasuk penguasaan perangkat lunak, analisis data, pemrograman, dan pemahaman tentang tren teknologi terbaru. Ini penting untuk memastikan lulusan siap menghadapi transformasi digital yang terus berlangsung.

Mengatasi kesenjangan keterampilan bukanlah tugas yang mudah, tetapi sangat penting untuk masa depan pendidikan tinggi dan daya saing ekonomi Indonesia. Perguruan tinggi harus berani melakukan reformasi kurikulum yang lebih responsif terhadap perubahan industri, sementara pemerintah dan sektor swasta perlu berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih adaptif.

Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia tidak hanya dapat mengurangi tingkat pengangguran lulusan, tetapi juga menciptakan generasi muda yang lebih siap menghadapi tantangan global. Inilah saatnya pendidikan tinggi bergerak dari sekadar pemberi ijazah menjadi pencipta talenta masa depan yang siap berkontribusi dalam pembangunan bangsa.